

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen program persiapan magang siswa luar negeri SMK Pusat Keunggulan di SMK Al-Huda Kota Kediri, dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian tiga dari sepuluh peserta bukan sekadar angka keberhasilan program, melainkan indikator adanya kesenjangan struktural antara idealitas fungsi POAC dan realitas implementasinya di lapangan. Secara kritis, hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian yang secara konseptual telah melibatkan BK sejak awal ternyata belum cukup untuk menjamin kesiapan mental peserta, sehingga muncul pertanyaan mendasar, yaitu apakah pelibatan BK selama ini benar-benar bersifat strategis dan preventif, atau justru masih bersifat formalitas struktural tanpa kapasitas intervensi yang memadai. Kesenjangan ini semakin diperkuat oleh temuan pada fungsi pengawasan, di mana keterbatasan akses sekolah terhadap proses pelatihan harian di LPK-SO menyebabkan seluruh siklus manajemen, betapapun rapi di atas kertas, kehilangan daya kendalinya justru pada fase yang paling menentukan keberhasilan peserta.

Kondisi ini memaknai bahwa model manajemen program magang luar negeri pada SMK Pusat Keunggulan saat ini masih timpang, kuat pada tahap perencanaan dan pengorganisasian yang bersifat administratif dan berada dalam kendali penuh sekolah, tetapi lemah pada tahap pelaksanaan dan pengawasan yang justru paling bergantung pada pihak eksternal (LPK-SO) dan

paling menentukan keberlanjutan peserta hingga tuntas mengikuti program. Implikasinya, keberhasilan program magang luar negeri tidak dapat semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen perencanaan atau kejelasan struktur organisasi, melainkan harus dievaluasi dari sejauh mana sekolah memiliki kewenangan nyata untuk melakukan intervensi korektif selama peserta berada di luar lingkungan sekolah itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa manajemen program vokasi berbasis kerja sama internasional menuntut lebih dari sekadar penerapan siklus POAC secara linear; ia menuntut penguatan otoritas kelembagaan sekolah dalam mengawal peserta lintas batas institusi, serta pergeseran orientasi manajemen kesiswaan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif yang benar-benar terintegrasi di setiap fase, bukan hanya pada tahap perencanaan. Temuan ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi kebijakan SMK Pusat Keunggulan secara lebih luas, bahwa status kelembagaan yang unggul di atas kertas tidak serta-merta menjamin efektivitas pengelolaan program hingga tuntas, apabila belum diikuti oleh kesiapan struktural dan kewenangan yang proporsional antara sekolah dan mitra pelaksana di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Bagi SMK Al-Huda Kota Kediri, perlu dilakukan penguatan sosialisasi program secara lebih komprehensif dan transparan sejak awal, penerapan mekanisme pembinaan disiplin peserta yang lebih mengikat melalui surat perjanjian bersama orang tua dan LPK-SO, serta

penyelenggaraan pengenalan dasar bahasa Jepang sebagai ekstrakurikuler sebagai bekal awal sebelum pelatihan formal dimulai. Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, perlu ditinjau kembali rentang waktu antara penetapan status SMK PK dan pelaksanaan program agar sekolah memiliki ruang persiapan yang memadai, disertai dengan peningkatan dukungan finansial dan pendampingan teknis yang proporsional, termasuk mekanisme pendampingan pasca-pemberangkatan bagi peserta yang sedang menjalani magang di luar negeri. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji fase pelaksanaan magang di negara tujuan dan fase pasca-kepulangan guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas program secara keseluruhan.